

**SALURAN KOMUNIKASI POLITIK  
DPRD KOTA BUKITTINGGI DALAM MENYERAP  
ASPIRASI KONSTITUEN**

**TESIS**

**Oleh :**

**MELANI RAHMADANTY  
BP. 1820862019**



**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. Ernita Arif, M.Si**
- 2. Dr. Aidinil Zetra, MA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

# SALURAN KOMUNIKASI POLITIK DPRD KOTA BUKITTINGGI DALAM MENYERAP ASPIRASI KONSTITUEN

Melani Rahmadanty, Ernita Arif, Aidinil Zetra

## ABSTRAK

DPRD adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya. Salah satu cara yang digunakan dalam menjangkau aspirasi oleh DPRD, adalah dengan memanfaatkan saluran komunikasi. Saluran komunikasi politik merupakan sarana untuk memudahkan penyampaian pesan-pesan politik. Seiring dengan kecanggihan teknologi komunikasi, saluran komunikasi politik yang paling banyak digunakan adalah dengan memanfaatkan media baru yaitu internet. Karena internet memiliki sifat terbuka, akses tanpa batas, dan siapa saja dapat berkomunikasi memperoleh serta berbagi informasi. Bahkan media internet mampu menjadi saluran komunikasi tersendiri dalam kegiatan berpolitik. Namun, ternyata DPRD Kota Bukittinggi dapat dikatakan tidak memaksimalkan pemanfaatan media internet tersebut dalam menyerap aspirasi konstituennya. Hal ini menyebabkan penyerapan aspirasi masyarakat pun dinilai kurang maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui saluran komunikasi politik apa saja yang digunakan oleh DPRD Kota Bukittinggi dalam menyerap aspirasi konstituen, mengetahui hambatan komunikasi yang dihadapi sehingga belum mengoptimalkan media internet sebagai saluran komunikasi politik, serta menganalisis kebutuhan saluran komunikasi yang diinginkan oleh DPRD dalam mengefektifkan hubungan dengan konstituen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran komunikasi politik yang digunakan oleh DPRD Kota Bukittinggi dalam menyerap aspirasi masyarakat dilakukan secara *konvensional*, yaitu masih seputaran kegiatan seremonial yang diatur oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti reses, kunjungan lapangan, serta rapat dengar pendapat atau *hearing*. Sedangkan hambatan media internet belum dioptimalkan pemanfaatannya dikarenakan kurangnya SDM pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, belum adanya arahan secara resmi yang menekankan penggunaan media sosial sebagai *job description* utama, dan untuk beberapa kalangan masyarakat tertentu penyampaian aspirasi masih cenderung dilakukan bertatap muka secara langsung. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa, aplikasi *mobile* berbasis *android* yang dirancang berdasarkan model komunikasi DeFleur dapat memenuhi kebutuhan saluran komunikasi yang diinginkan oleh DPRD Kota Bukittinggi dalam mengefektifkan hubungan dengan konstituennya. Aplikasi ini kedepannya akan lebih disempurnakan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak guna mendapatkan kejelasan informasi, transparansi, dan kebebasan berpendapat. Sehingga semua keluhan, ide, gagasan, kritik, saran serta tuntutan masyarakat dapat disampaikan dan disalurkan dengan baik.

*Kata Kunci: Saluran Komunikasi Politik, Model Komunikasi DeFleur, Aplikasi Mobile Berbasis Android, DPRD Kota Bukittinggi.*

## ***POLITICAL COMMUNICATION CHANNELS OF BUKITTINGGI CITY DPRD IN ABSORBING CONSTITUENT ASPIRATIONS***

**Melani Rahmadanty, Ernita Arif, Aidinil Zetra**

### ***ABSTRACT***

*DPRD is a representative institution where people express their aspirations and voice their interests. One of the methods used in capturing aspirations by the DPRD is to utilize communication channels. Channels of political communication are a means to facilitate the delivery of political messages. Along with the sophistication of communication technology, the most widely used channel of political communication is to utilize new media, the internet. Because the internet has an open nature, unlimited access, and anyone can communicate to obtain and share information. Even internet media can become its own communication channel in political activities. However, it turns out that the Bukittinggi City DPRD can be said to have not maximized the use of internet media in absorbing the aspirations of its constituents. This causes the absorption of people's aspirations to be considered less than optimal. This study uses a qualitative method with a descriptive approach that aims to find out what channels of political communication are used by the Bukittinggi City DPRD in absorbing constituents' aspirations, knowing communication barriers faced so as not to optimize the internet media as a political communication channel, and to analyze the needs of the desired communication channels by the DPRD in making effective relations with constituents. The results showed that the political communication channel used by the Bukittinggi City DPRD in absorbing people's aspirations was carried out conventionally, which was still around ceremonial activities governed by applicable laws and regulations, such as recess, field visits, and hearings or hearings. While the utilization of internet media has not been optimized due to lack of human resources at the Secretariat of the Bukittinggi City DPRD, there are no official directives that emphasize the use of social media as the main job description, and for certain groups of people, the delivery of aspirations still tends to be done face to face. The research findings also show that an android-based mobile application designed based on the DeFleur communication model can meet the needs of the communication channels desired by the Bukittinggi City DPRD in streamlining relations with its constituents. In the future, this application will be more refined, so that it can be used by both parties to get clarity of information, transparency, and freedom of opinion. So that all complaints, ideas, ideas, criticisms, suggestions, and demands of the community can be conveyed and channeled properly.*

*Keywords: Political Communication Channels, DeFleur Communication Model, Android-Based Mobile Application, Bukittinggi City DPRD.*